

## KAJIAN DINAMIKA FAKTOR SOSIO-EKONOMI DAN KRIMINALITAS UNTUK PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

**Sitti Retno Faridatussalam\***

*Economic Development, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia*

**Dinar Wahyuningrum**

*Economic Development, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia*

**Rosa Ambar Sari**

*Economic Development, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia*

**\*Corresponding Author**

Sitti Retno Faridatussalam

[Srf122@ums.ac.id](mailto:Srf122@ums.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history :

**Received:**

21 October 2025

**Revised:**

25 November 2025

**Accepted:**

01 December 2025

### ABSTRACT

The dynamics of cultural growth and the rapid development of science and technology give birth to competition in various aspects of human life, such as ideology, social, economic, art, and moral. Many changes have occurred in the values contained in it, such as materialism, hedonism, and so on. This also results in changes in the values contained in society. These changes also have an impact on human behavior. Positive changes are of course, very beneficial to society, but negative changes can cause unrest in people's lives as a result of humans behaving negatively, such as committing criminal acts. Crime in Indonesia is rampant; the high crime rate really needs attention from the government and law enforcement officials. The increase in the number of crimes is suspected to be influenced by several economic factors such as unemployment, economic growth, quality of human resources, and population density. The purpose of this study is to analyze crime and economic conditions in 34 provinces in Indonesia. Analyzing the influence of economic components such as public consumption patterns, unemployment, the quality of human resources as seen from the education sector, and population density on the crime rate in Indonesia for the period 2018 to 2022.

**Keywords:** Crime rate; consumption; education; unemployment; population density

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan suatu negara. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia, terus berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, dinamika pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi. Salah satunya adalah fenomena kriminalitas yang terus menjadi tantangan bagi stabilitas pembangunan nasional.

Kriminalitas di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kejahatan yang dilaporkan di seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai 372.965 kasus, meningkat tajam sebesar 55,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menghasilkan tingkat kejahatan sebesar 137 per 100.000 penduduk, lebih tinggi dari tingkat 90 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Fenomena ini tidak hanya mengancam rasa aman masyarakat, tetapi juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap iklim investasi, produktivitas ekonomi, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hubungan antara faktor sosio-ekonomi dan kriminalitas telah menjadi fokus kajian yang mendalam dalam literatur kriminologi dan ekonomi pembangunan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan ketimpangan pendapatan yang lebih lebar berhubungan dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi, dimana kesenjangan dalam pengeluaran non-pangan memiliki dampak yang lebih besar terhadap tingkat kejahatan dibandingkan kesenjangan pengeluaran pangan dan rasio Gini (Sugiharti et al., 2023). Kondisi ini menciptakan lingkaran setan dimana kriminalitas menghambat pertumbuhan ekonomi, sementara stagnasi ekonomi dapat memperburuk kondisi sosial yang memicu kejahatan.

Ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diinginkan dan kemampuan individu untuk mencapainya dapat menciptakan ketegangan atau tekanan yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal (Atmadi et al., 2024). Teori ini mengasumsikan bahwa individu pada dasarnya taat hukum, namun ketika terdapat kesenjangan antara tujuan yang diinginkan secara sosial dan kemampuan legitimat untuk mencapainya, tekanan yang timbul dapat mendorong individu ke arah tindakan kriminal.

Pengangguran menciptakan tekanan ekonomi dan sosial pada individu, mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka (Sabiq & Apsari, 2021). Ketika seseorang mengalami ketidakpuasan karena tidak dapat mencapai tujuan ekonomi yang dianggap penting dalam masyarakat, seperti keberhasilan finansial, mereka dapat merasakan tekanan yang mendorong perilaku menyimpang.

Dari perspektif ekonomi, ketimpangan pendapatan berhubungan dengan peningkatan aktivitas kriminal. Teori ekonomi kejahatan yang dikembangkan oleh Gary Becker (1968) memandang keputusan untuk melakukan kejahatan sebagai pilihan rasional

berdasarkan analisis biaya manfaat (Karpavicius et al., 2024). Ketika legitimasi ekonomi terbatas dan kesenjangan pendapatan melebar, keuntungan yang diharapkan dari kejahatan dapat melebihi risikonya, mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Kesenjangan pendapatan yang lebih lebar memberikan tekanan yang lebih tinggi pada individu-individu yang merasa kurang berhasil, yang juga diterjemahkan menjadi insentif yang lebih besar untuk melakukan kejahatan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan kompleksitas hubungan ini. Studi oleh (Sugiharti et al., 2023) menemukan bahwa tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan ketimpangan pendapatan yang lebih lebar berhubungan dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi, dimana kesenjangan dalam pengeluaran non-pangan memiliki dampak yang lebih besar terhadap tingkat kejahatan dibandingkan kesenjangan pengeluaran pangan dan rasio Gini. Lebih lanjut, penelitian (Muryani et al., 2021) menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi dapat mengurangi kekerasan fisik dan tingkat kejahatan secara umum, namun pencurian dan penipuan meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan.

Penelitian Nurbasuni & Khoirunurrofik (2024) menunjukkan bahwa kejahatan menjadi kurang merugikan bagi pertumbuhan ekonomi ketika pengeluaran publik cukup memuaskan dan tingkat partisipasi angkatan kerja berada pada tingkat optimal, menunjukkan respons asimetris pertumbuhan ekonomi terhadap kejahatan tergantung pada kebijakan publik dan penggunaan tenaga kerja dalam ekonomi (Nurbasuni & Khoirunurrofik, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika faktor sosio-ekonomi berpengaruh dengan tingkat kriminalitas di Indonesia. Penelitian ini berupaya memahami variabel-variabel seperti pola konsumsi, pengangguran, kepadatan penduduk, dan pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji bagaimana kriminalitas berdampak terhadap aktivitas ekonomi, baik melalui saluran produktivitas, investasi, maupun stabilitas sosial yang menjadi prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui perbaikan kondisi sosial dan penurunan tingkat kriminalitas.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Teori Strain***

Teori ini berfokus pada bagaimana struktur sosial dapat menciptakan tekanan atau strain yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk kriminalitas. Dalam pandangan Merton, masyarakat modern sering kali menetapkan tujuan-tujuan bersama yang dianggap sebagai standar kesuksesan, seperti kekayaan, status sosial, atau stabilitas ekonomi. Namun, tidak semua individu memiliki akses yang setara untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara-cara legal yang diterima secara sosial, seperti pendidikan formal atau pekerjaan yang stabil. Ketidaksesuaian antara tujuan yang

diinginkan dan cara yang tersedia untuk mencapainya inilah yang menciptakan strain (Steele & Durkin, 2024).

Merton menggambarkan bagaimana strain ini dapat memicu adaptasi yang berbeda pada individu. Mereka yang menghadapi tekanan mungkin merasa terjebak dalam situasi di mana mereka tidak dapat memenuhi harapan sosial secara sah. Beberapa individu kemudian memilih untuk menyesuaikan diri melalui cara-cara ilegal, seperti mencuri, menipu, atau bahkan melakukan kekerasan, sebagai respons terhadap ketidakmampuan mereka untuk memenuhi standar sosial. Dalam konteks ini, kriminalitas dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap struktur sosial yang tidak adil, di mana sistem masyarakat secara tidak langsung mendorong individu untuk melanggar norma demi mencapai kesuksesan (Bethencourt, 2022; Kyrkopoulou et al., 2024).

Teori ini menjadi sangat relevan dalam masyarakat dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi. Ketika sebagian besar kekayaan dan sumber daya hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, mereka yang berada di lapisan bawah hierarki sosial cenderung mengalami strain yang lebih besar. Ketimpangan ini menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpuasan, yang dapat memicu perilaku menyimpang. Misalnya, di banyak kota besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, kelompok masyarakat yang terpinggirkan sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas atau pekerjaan yang layak. Hal ini meningkatkan risiko mereka untuk terlibat dalam aktivitas kriminal sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan sosial yang mereka alami.

### ***Pola Konsumsi***

Pendekatan utama dalam teori konsumsi adalah hipotesis pendapatan absolut yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes. Dalam pandangan ini, tingkat konsumsi seseorang terutama ditentukan oleh pendapatannya. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga akan meningkat, meskipun tidak dalam proporsi yang sama karena sebagian dari pendapatan tambahan akan disimpan. Teori ini mencerminkan hubungan langsung antara pendapatan dan konsumsi, yang sangat relevan dalam memahami dinamika ekonomi jangka pendek. Konsumsi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, tetapi juga oleh usia dan ekspektasi masa depan. Dalam pandangan ini, individu cenderung mengalokasikan sumber daya mereka secara merata sepanjang hidup. Sebagai contoh, mereka mungkin berutang saat muda untuk membiayai pendidikan atau membeli rumah, meningkatkan tabungan saat berada pada puncak karier, dan akhirnya menghabiskan tabungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan selama masa pensiun. Hipotesis ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana keputusan konsumsi berubah seiring waktu dan tahap kehidupan .

### ***Pengangguran***

Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang berada dalam usia kerja produktif dan secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai. Fenomena ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan

ekonomi suatu negara. Pengangguran tidak hanya mencerminkan masalah individu, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

### ***Kepadatan Penduduk***

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu per satuan luas. Biasanya, kepadatan penduduk dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer persegi ( $\text{jiwa/km}^2$ ). Indikator ini penting untuk memahami bagaimana populasi tersebar di suatu wilayah, serta untuk menganalisis berbagai aspek terkait dengan penggunaan lahan, sumber daya, dan kebutuhan infrastruktur.

Kepadatan penduduk dapat berbeda secara signifikan antara wilayah satu dengan yang lain, tergantung pada faktor-faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Wilayah perkotaan cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi karena konsentrasi aktivitas ekonomi, fasilitas, dan layanan publik. Sebaliknya, wilayah pedesaan atau daerah dengan kondisi geografis yang kurang mendukung, seperti pegunungan atau gurun, biasanya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah (Tayebi et al., 2024).

Kepadatan penduduk yang tinggi sering kali dikaitkan dengan tantangan seperti tekanan terhadap sumber daya alam, kemacetan, polusi, dan kebutuhan perumahan yang tinggi. Namun, di sisi lain, daerah dengan kepadatan penduduk tinggi juga dapat memberikan keuntungan seperti efisiensi dalam distribusi layanan publik, transportasi, dan peluang ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, kepadatan penduduk yang rendah, meskipun dapat mengurangi tekanan pada sumber daya, sering kali dikaitkan dengan tantangan lain seperti kesulitan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur karena jarak yang jauh antar penduduk.

### ***Pendidikan***

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, emosional, maupun moral. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga menjadi dasar penting dalam pembentukan individu yang kompeten dan masyarakat yang maju.

Pendidikan mencakup berbagai bentuk dan tingkat, mulai dari pendidikan formal, seperti sekolah dan universitas, hingga pendidikan informal yang terjadi melalui interaksi sehari-hari, keluarga, atau komunitas. Secara umum, pendidikan formal biasanya memiliki struktur yang sistematis, kurikulum yang terorganisir, serta tujuan yang terukur, sedangkan pendidikan informal lebih bersifat fleksibel dan kontekstual.

Filosofi pendidikan menekankan pentingnya pengembangan manusia secara holistik, yang meliputi tidak hanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga penguatan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Dalam perspektif ini,

pendidikan tidak hanya berperan sebagai alat untuk mencapai keberhasilan individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

Pendidikan memiliki dampak yang luas dan mendalam pada kehidupan individu maupun masyarakat. Pada tingkat individu, pendidikan membantu seseorang memahami dunia, memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja, dan membuka peluang sosial maupun ekonomi yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan pendapatan, kesehatan yang lebih baik, dan tingkat partisipasi politik yang lebih aktif (Hazra & Aranzazu, 2022).

Bagi masyarakat, pendidikan berfungsi sebagai pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan sering dianggap sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (Bayas & Grau, 2023).

## METODE PENELITIAN

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Variabel terkait yaitu Tingkat Kriminalitas, Pola Konsumsi, Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Kepadatan Penduduk. Data Sekunder yang digunakan merupakan data panel, yaitu kombinasi dari *cross section* dan *time series*. Penelitian ini menggunakan 34 provinsi di Indonesia

sebagai data *cross section* dan waktu yang digunakan adalah tahun 2018-2022 sebagai data *time series*.

Penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan alat dan analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merujuk pada data yang menggabungkan karakteristik individu serta informasi waktu. Memperoleh hasil analisis, data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan bantuan aplikasi Eviews 10 yang kemudian dilakukan uji pemilihan model dengan menggunakan Uji Chou dan Uji Hausman kemudian dilakukan juga dengan Uji T dan Uji F.

$$Crime_{it} = \beta_0 + \beta_1 Cons_{it} + \beta_2 Edu_{it} + \beta_3 Uemp_{it} + \beta_4 Pop_{it} + \varepsilon_{it}$$

$Crime_{it}$  = Tingkat Kriminalitas di provinsi i pada tahun t (%)

$Cons_{it}$  = Pola Konsumsi di provinsi i pada tahun t (Ribu Rp)

$Edu_{it}$  = Pendidikan di provinsi i pada tahun t

$Pop_{it}$  = Kepadatan penduduk di provinsi i pada tahun t

$\beta_0$  = intercept,

$\varepsilon_{it}$  = error.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow digunakan untuk membandingkan dua model, yaitu *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), guna menentukan model yang paling sesuai. Pemilihan model didasarkan pada hasil uji yang melihat nilai probabilitas dari statistik F. Jika nilai probabilitas F menunjukkan angka yang kurang dari  $\alpha$  0,05 maka model terpilih yaitu *Fixed Effect Model*. Di sisi lain, apabila nilai probabilitas F lebih dari  $\alpha$  0,05 maka model terpilih adalah *Common Effect Model* :

**Tabel 1: Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross section F	17,201	(33,132)	0,000

Sumber : Eviews10 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil dari Chow Test menunjukkan nilai probabilitas F sebesar 0,000 atau besarnya lebih kecil dibandingkan  $\alpha$  0,05. Hal ini dapat diambil Kesimpulan bahwa model terpilih adalah *fixed effect model*.

### **Hausman Test**

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terpilih antara Random Effect Model dan Fixed Effect Model. Pemilihan model didasarkan pada nilai probabilitas dari statistik Chi-Square. Jika nilai probabilitas Chi-Square kurang dari  $\alpha$  0,05, maka model yang sesuai adalah Fixed Effect Model. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Chi-Square lebih dari  $\alpha$  0,05, maka Random Effect Model menjadi model terpilih untuk digunakan pada penelitian ini.

**Tabel 2: Hasil Hausman Test**

Effects Test	Chi Square Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section random	15,480	4	0,0038

Sumber : Eviews10 (diolah)

Hasil tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil dari hausman test menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,0038. Hal ini menunjukkan angka kurang dari  $\alpha$  0,05, maka dapat diartikan bahwa model terpilih yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah fixed effect model.

**Tabel 3: Hasil Model Fixed Effect Model**

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-81,039	180,125	1,301	0,653
CONS	0,027	0,020	-0,923	0,196
EDU	-21,169	22,926	2,962	0,357
UEMP	7,756	4,663	1,663	0,099
POP	0,216	0,0728	2,963	0,004
R <sup>2</sup>	0,824		F-stat	16,769
Adj- R <sup>2</sup>	0,775		Prob(F-Stat)	0,000

Sumber : Eviews10 (diolah)

Hasil uji T statistic diatas dapat diketahui bahwa variabel pola konsumsi memiliki nilai koefisien sebesar 0,027 dan nilai probabilitas 0,196 > (0,05) yang dapat diartikan pola konsumsi tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Variabel pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar -21,169 dan nilai probabilitas 0,357 (>0,05) yang dapat dijelaskan bahwa variabel pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.

Sementara itu, variabel pengangguran memiliki pengaruh negative terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Nilai koefisien sebesar 7,756. Hal ini dapat dijelaskan ketika pengangguran naik sebesar 1% maka kriminalitas di 34 provinsi mengalami peningkatan sebanyak 7,7 kasus yang dibulatkan menjadi 8 Kasus. Nilai probabilitas sebesar 0,099 (<0,1) artinya pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas. Variabel kepadatan penduduk mempunyai nilai koefisien sebesar 0,216 dari angka tersebut dapat diartikan apabila kepadatan penduduk meningkat sebesar 1 orang/km<sup>2</sup> maka Tingkat kriminalitas dapat meningkat sebesar 0,216 atau 1 perkara.

Pola konsumsi yang diukur dengan pengeluaran perkapita menunjukkan hubungan negative tidak signifikan. Berdasarkan hasil estimasi ini, pola konsumsi yang tinggi tidak mencerminkan adanya penurunan tingkat kriminalitas di Indonesia. Konsep *benefit and cost* yang dikemukakan oleh (Li & Sun, 2024) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita memiliki hubungan negatif dengan tingkat kriminalitas. Adanya pola konsumsi yang meningkat, ekspektasi masyarakat terhadap gaya hidup juga meningkat, yang pada akhirnya mengurangi kecenderungan untuk melakukan kejahatan karena adanya peningkatan kesempatan ekonomi dan kesejahteraan. Pola konsumsi yang tinggi dalam kata lain masyarakat yang konsumtif secara langsung memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas, namun pengaruh tersebut terbatas pada jenis kejahatan tertentu seperti pencurian properti, perampokan rumah, perampasan, dan penjabretan.

Pendidikan memiliki pengaruh yang paling kecil dan tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2018 (Hachica & Triani, 2022). Pendidikan justru berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan. Walaupun begitu, pendidikan tetap memiliki pengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia. Adanya pendidikan tinggi akan



mengurangi tingkat kriminalitas. Hal ini bisa dilihat dari penduduk yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mudah diterima bekerja di suatu perusahaan dari pada dengan penduduk yang hanya lulusan SMA. Sehingga penduduk berpendidikan tinggi akan bisa mengeluarkan dirinya dari *vicious circle of poverty* dan menjadi penduduk yang ekonominya menengah ke atas. Dalam kata lain, tingkat kemiskinan akan menurun dan secara tidak langsung tingkat kriminalitas akan turun juga (Audey & Ariusni, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengangguran memiliki hubungan positif terhadap tingkat kriminalitas. Maka dari itu jika tingkat pengangguran meningkat, tingkat kriminalitas pun akan meningkat. Penduduk di Pulau Jawa sangat banyak, tetapi lapangan pekerjaannya kurang memadai. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk Pulau Jawa yang pengangguran dan tingkat kriminalitas juga tinggi jika dibandingkan dengan pulau lain (Riska Franita, 2016). Dalam segi individu, pengangguran memberikan tekanan berat bagi para pengangguran, sehingga pengangguran kehilangan keterampilan, percaya diri, depresi, dan lainnya. Dalam segala segi, pengangguran dapat berujung pada tindakan kriminal karena situasi dan kondisi yang membuat seseorang tidak dapat berpikir jernih dan menekan serta memaksa seseorang untuk mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Dari & Asnidar, 2022). Ketika seorang individu lebih lama menjadi pengangguran maka peluang untuk melakukan tindak kriminal akan semakin tinggi di lingkungan masyarakat. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran tinggi akan mendorong tindak kriminalitas.

Kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas. Semakin tinggi kepadatan penduduk maka tingkat kriminalitas semakin besar. Banyaknya penduduk melebihi lapangan kerja yang tersedia, fasilitas kesehatan yang terbatas, ketersediaan barang konsumen yang terbatas.

## KESIMPULAN

Pengaruh berbagai faktor sosial-ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia selama periode 2018-2022. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pola konsumsi dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Namun, tingkat pengangguran dan kepadatan penduduk menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kriminalitas.

Tingkat pengangguran yang tinggi meningkatkan peluang individu untuk melakukan tindak kriminal, terutama karena tekanan ekonomi dan sosial yang dihadapi. Setiap peningkatan 1% dalam tingkat pengangguran diasosiasikan dengan peningkatan 7-8 kasus kriminalitas. Kepadatan penduduk juga memiliki kontribusi terhadap kriminalitas, di mana wilayah dengan jumlah penduduk tinggi cenderung mengalami konflik dan ketegangan sosial lebih besar, yang memperluas ruang gerak bagi pelaku kriminal.

Meskipun pola konsumsi dan pendidikan tidak secara langsung memengaruhi tingkat kriminalitas, keduanya tetap penting dalam konteks pembangunan sosial.

Pendidikan, khususnya, berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan peluang kerja, yang secara tidak langsung dapat mengurangi kriminalitas di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalitas merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Oleh karena itu, upaya pengendalian kriminalitas memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan lapangan kerja, pengelolaan kepadatan penduduk, serta perbaikan sistem pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan aman.

## REFERENSI

- Audey, R. P., & Ariusni, A. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 653–666.
- Bayas, A., & Grau, N. (2023). Inequality of opportunity in juvenile crime and education. *International Journal of Educational Development*, 103. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102901>
- Bethencourt, C. (2022). Crime and social expenditure: A political economic approach. *European Journal of Political Economy*, 75, 102183. <https://doi.org/10.1016/J.EJPOLECO.2022.102183>
- Dari, S. W., & Asnidar, A. (2022). Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas. *Niagawan*, 11(1), 68–79.
- Hachica, E., & Triani, M. (2022). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 63–70.
- Hazra, D., & Aranzazu, J. (2022). Crime, correction, education and welfare in the U.S. – What role does the government play? *Journal of Policy Modeling*, 44(2), 474–491. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2022.03.007>
- Karpavicius, T., Stavytsky, A., Giedraitis, V. R., Ulvidienė, E., Kharlamova, G., & Kavaliauskaite, B. (2024). What Determines the Crime Rate? A Macroeconomic Case Study. *Economies* 2024, Vol. 12, Page 250, 12(9), 250. <https://doi.org/10.3390/ECONOMIES12090250>
- Kyrkopoulou, E., Louka, A., & Fabbe, K. (2024). Economic crisis and crime: Money under the mattress during financial destabilization. *Journal of Policy Modeling*, 46(3), 514–529. <https://doi.org/10.1016/J.JPOLMOD.2024.02.003>
- Li, L., & Sun, C. (2024). How does digital finance reduce urban crime rate? *Finance Research Letters*, 63, 105382. <https://doi.org/10.1016/J.FRL.2024.105382>

- Ludwig, J., Duncan, G. J., & Hirschfield, P. (2001). Urban Poverty and Juvenile Crime: Evidence from a Randomized Housing-Mobility Experiment. *The Quarterly Journal of Economics*, 116(2), 655–679. <https://doi.org/10.1162/00335530151144122>
- Muryani, Esquivias, M. A., Sethi, N., & Iswanti, H. (2021). Dynamics of Income Inequality, Investment, and Unemployment in Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, 29, 660–678. <https://doi.org/10.25133/JPSSV292021.040>
- Nurbasuni, L. E., & Khoirunurrofik, K. (2024). Between crime and economic growth: the asymmetric role of public expenditure and unemployment. *Review of Regional Research* 2024 44:1, 44(1), 21–45. <https://doi.org/10.1007/S10037-024-00202-2>
- Riska Franita. (2016). Analisa pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/97>
- Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2021). Dampak pengangguran terhadap tindakan kriminal ditinjau dari perspektif konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51–64.
- Steele, J. L., & Durkin, K. F. (2024). Beyond urban centers: Investigating general strain theory and opioid use among rural adolescents. *Journal of Criminal Justice*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102307>
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The Nexus between Crime Rates, Poverty, and Income Inequality: A Case Study of Indonesia. *Economies* 2023, Vol. 11, Page 62, 11(2), 62. <https://doi.org/10.3390/ECONOMIES11020062>
- Tayebi, N., Andersson, A., Ling, S., Evans, B., Larsson, H., & Tuvblad, C. (2024). The association between depression and crime outcomes: A Swedish population-based study. *Journal of Criminal Justice*, 94, 102271. <https://doi.org/10.1016/J.JCRIMJUS.2024.102271>